

## **ABSTRAK**

### **MENELAAH KEABSAHAN PEMERINTAHAN HASIL KUDETA MILITER DI MYANMAR BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL: SETELAH PEMILU 2020**

**HAEKAL WICAKSONO**

\*Mahasiswa Fakultas Hukum,

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email : [haikalwicks@gmail.com](mailto:haikalwicks@gmail.com)

Pengambilan alih paksa pemerintahan suatu negara disebut juga sebagai kudeta (Kudeta), kudeta menjadi polemik pada keabsahannya dalam hukum Internasional, seperti peristiwa kudeta di myanmar setelah pemilu 2020 yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan tertinggi militer atau kepala junta militer myanmar. pengaturan mengenai Kudeta di mata hukum Internasional harus lah di telaah dengan baik dan benar. Adanya konvensi montevideo tentang Hak dan Tugas Negara membekali negara Internasional agar kudeta tidak dilakukan sewenang wenang sehingga menimbulkan pelanggaran-pelanggaran dari aturan hukum Internasional. Melihat kudeta militer myanmar dari konsep pengakuan Internasional terhadap pemerintah sebuah negara, kemudian dari konsep pengakuan Internasional terhadap suksepsi pemerintahan myanmar. selanjutnya bagaimana konsep pengakuan Internasional terhadap pemerintahan yang di dapat atau berasal dari Kudeta. Dan mengenai bagaimana keabsahan kudeta sebagai Bentuk transisi pemerintahan dalam persepektif Hukum Internasional. Sehingga menjadi jelas mengenai tindakan kudeta militer myanmar yang menjadi benar apabila tidak melanggar aturan hukum Internasional dan menjadi salah apabila melanggar aturan-aturan hukum Internasional.

Kata kunci : Kudeta, Militer, Myanmar.

**ABSTRACT**

**REVIEWING GOVERNMENT LEGIBILITY DUE TO THE MILITARY COUP  
IN MYANMAR IN AN INTERNATIONAL LEGAL PERSPECTIVE: AFTER  
THE 2020 ELECTIONS**

**HAEKAL WICAKSONO**

*\*Student of the Faculty of Law,*

*Jakarta "Veteran" National Development University*

Email : [haikalwicks@gmail.com](mailto:haikalwicks@gmail.com)

*The forcible takeover of a countrys government also known as a coup d'état has challenged the legality of international law as in the case of Myanmar after a coup d'état by top military forces. 2020 election for the ruling party or head of the military government of Myanmar. The rules of sedition must be studied properly and properly in the light of international law. The existence of the Montevideo Convention on the Rights and Duties of States prepares international states against unilateral coups that violate international law. Myanmars military coup is viewed from the concept of international recognition of a countrys government to the concept of international recognition of Myanmars governments legacy. In that case the government will either be internationally recognized or come from a coup d'état. and how the legitimacy of insurgency as a form of regime change can be viewed from the perspective of international law. Thus it becomes clear that Myanmars military coup act is right if it does not violate the rules of international law and wrong if it does.*

*Keywords : Coup, Military, Myanmar.*